

Keterkaitan Teori Hegemoni dengan Cerpen “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Etty Umamy

Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: umamy.etty@gmail.com

***Abstract:** Literary works are created as a means for authors to express their feelings and thoughts and voice their ideas, views, or life hopes. A short story is a form of literary work. Short stories can be dissected with a hegemonic approach. The theory of hegemony is a political theory put forward by Antonio Gramsci (1891-1937). The theory of hegemony is suitable to be used to dissect the short story entitled *The People's Court* by Putu Wijaya. This is because the concept of the story built in the short story of *The People's Court* refers to the discussion of power. With the hegemonic approach, it is found that there are two models of hegemony that are often used in Putu Wijaya's poem entitled *People's Court*, namely the concept of coercion and building several forms of hegemony in kinship.*

***Keywords:** hegemony, short story, people's justice*

PENDAHULUAN

Begitu tampak perbedaan antara dunia sastra dengan apa yang ada di luar dunia sastra. Orang tahu bahwa sastra adalah pola pemikiran yang menunjukkan keluwesan, berbau imajinatif, dan banyak pula yang menilai di luar rasional. Dikatakan kurang rasional karena sastra bersifat imajinatif dan khayalan. Namun, tidak seluruhnya sastra bersifat khayalan karena ada beberapa karya sastra yang berangkat dari sebuah pengalaman atau kehidupan nyata yang diangkat menjadi cerita. (Moh. Najid. Apresiasi Prosa Fiksi.2009: 47) yang menyatakan bahwa ada sebuah karya sastra yang berangkat dari bahan-bahan yang diangkat dan semesta (pengalaman hidup penulis atau hasil penghayatan penulis terhadap kehidupan sekitarnya). Hal tersebut membuktikan bahwa tidak selamanya karya sastra berada pada khayalan, namun ada pula yang berangkat dari kenyataan yang bernilai faktual.

Budi Darma (1984: 25) berpendapat bahwa sastrawan dan anggota masyarakat dalam fungsinya sebagai orang pinggiran sekaligus sebagai pemikir dituntut untuk ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat (pembaca) dan harus mampu menundukan realitas dan imajinasi dan aspirasinya, sehingga masyarakat dapat melihat identitas dirinya melalui karya sastra yang dinikmatinya. Seorang sastrawan untuk menciptakan suatu karya sastra tidak dapat berangkat dari kekosongan belaka. Pengalaman hidup merupakan sumber inspirasi untuk menghasilkan karya sastra.

Karya sastra diciptakan dengan berbagai maksud dan tujuan. Salah satu tujuannya, yaitu sebagai sarana bagi pengarang untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran serta menyuarakan gagasan, pandangan, atau harapan hidupnya. Kebanyakan apa yang diungkapkan pengarang dalam karya sastranya merupakan hasil refleksi atas apa yang dialaminya, dilihatnya, dirasakannya, dan diharapkannya dari kehidupan ini. Sebenarnya, apa yang diungkapkan pengarang dalam cerita merupakan cerminan dan

gambaran apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ada tiga jenis karya sastra, yakni puisi, prosa fiksi, dan drama. Ada pemilahan lagi untuk jenis prosa fiksi: cerpen dan novel.

Cerpen merupakan satu dari berbagai karya sastra yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *short story*. Namun demikian, apa sebenarnya dan bagaimana ciri-ciri cerita pendek itu, banyak yang masih belum memahaminya. Cerpen kategori karya sastra yang mempunyai unsur intrinsik, ekstrinsik, dan struktur cerita yang dibangun di dalamnya. Cerpen menurut Satyagraha Hoerip (1979) adalah karakter yang “dijabarkan” lewat rentetan kejadian daripada kejadian-kejadian itu sendiri satu persatu. Apa yang “terjadi” di dalamnya lazim merupakan suatu pengalaman atau penjelajahan. Reaksi mental itulah yang pada hakikatnya disebut sebagai cerpen. Sedangkan menurut kata yang membentuk cerpen, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi cerita sebagai tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal, dan pendek berarti kisah pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau suatu ketika (1988:165). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa cerpen banyak mengisahkan suatu kejadian yang mana kejadian tersebut memiliki tokoh yang terpusat yang terdiri atas tokoh utama dan memiliki satu situasi yang berarti di suatu masa yang juga rentang waktunya tidak terlalu lama.

Menurut Susanto dalam Tarigan (1984:176), cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Sementara itu, Sumardjo dan Saini (1997:37) mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita atau parasi (bukan analisis argumentatif) yang fiktif (tidak benar-benar terjadi tetapi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, serta relatif pendek). Dari beberapa pendapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita pendek adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya relatif singkat tetapi padat.

Karya sastra selalu memiliki ruang perhatian publik karena fungsinya sebagai pengungkap kenyataan dan penghayatan manusia yang paling dalam. Kajian karya sastra adalah kegiatan mempelajari unsur-unsur dan hubungan antarunsur-unsurnya dalam karya sastra dengan bertolak pada pendekatan, teori, dan cara kerja tertentu (Aminudin, 1991: 39). Sementara penelitian sastra sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk membuahkkan ciri sistemik karya sastra, baik secara eksternal maupun internal berdasar teknik dan metode tertentu.

Dalam fiksi ditemukan sebuah kenyataan yang berbeda dari kenyataan yang dimiliki, suatu dunia mungkin yang lain (Van Zoest, 1990: 35). Untuk membangun dunia dan untuk membayangkan bahwa hal-hal dalam dunia tersebut berlainan dengan yang biasa dialami dibutuhkan daya rentang dari kemampuan berkhayal dan kekuatan jiwa. Konsep berfikir yang demikian perlu dimiliki oleh apresiator karya sastra. Apresiator juga harus menggunakan beberapa pendekatan yang berperan sebagai pisau (teori) untuk membedah karya sastra. Banyak hal yang dapat ditemukan dalam membedah karya sastra. Apresiator akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Selain nilai, fenomena yang dibangun

dalam sebuah karya sastra juga dapat diteliti dan diketahui relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi unsur intrinsik dan ekstrinsik.

Berbagai pendekatan digunakan untuk membedah sebuah karya sastra khususnya cerpen. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan hegemoni. Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Hegeishtai*. Istilah tersebut berarti memimpin, kepemimpinan, atau kekuasaan yang lain. Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik yang penting abad XX. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891—1937). Antonio Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan: (ideologi) mendiktekan seluruh cita, ras, kebiasaan, moral, prinsip-prinsip religius, dan politik, serta seluruh hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral (Gramsci. 1891). Gramsci berpendapat bahwa agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

Bentuk hegemoni tidak sebatas pada kekuasaan fisik semata yang tampak pada kelompok dominan dengan bawahan. Hegemoni dapat berupa penanaman doktrin atau ideologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau mengubah paradigma dari orang lain. Terlepas dari perubahan paradigma yang ditanamkan baik ataupun buruk, jika berhasil mengubah pandangan seseorang hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai hegemoni. Hegemoni sebagai konsep untuk mendominasi, mengarahkan, dan mengendalikan orang lain melalui ide dan gagasan yang mampu mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu. Pada hakikatnya hegemoni akan selalu punya cara untuk memperoleh dukungan dan sebaliknya yang tertindas tidak selalu berani melakukan perlawanan.

Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan. Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekrut kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk merekrut kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga-lembaga pendidikan dan seni.

John Storey (2007) menjelaskan konsep hegemoni sebagai sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.

Mengacu pada pemikiran Michel Foucault (Kebung, 2017), kekuasaan diartikan bukan sebagai sebuah benda yang bisa dimiliki, diberikan atau dipindahtangankan. Kekuasaan merupakan strategi yang kompleks dalam suatu

masyarakat dengan mekanisme tertentu. Dengan pemikiran tersebut, negara tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan bekerja pada negara dan kapital, sementara itu, kebijakan pendidikan dilihat sebagai salah satu wujudnya.

Gramsci memberikan penjelasan agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999:31).

PEMBAHASAN

A. Model Hegemoni dalam Kontrol Sosial

Gramsci menyebutkan dua model berbeda dalam kontrol sosial. Pertama, kontrol koersif merupakan sebuah kontrol sosial yang terwujudkan melalui kekuatan langsung atau ancaman (dibutuhkan oleh sebuah kepemimpinan ketika kepemimpinan rendah atau lemah). Kedua, kontrol konsensual merupakan sebuah kontrol yang muncul ketika individu secara sukarela berasimilasi dengan pandangan dari kelompok yang mendominasi. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat masyarakat dominan. Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk untuk berkuasa.

Dalam membahas (membedah) cerpen yang berjudul *Peradilan Rakyat* karya Putu Wijaya menggunakan pendekatan hegemoni. Hal tersebut karena konsep cerita yang dibangun di dalam cerpen *Peradilan Rakyat* merujuk pada pembahasan mengenai kekuasaan. Konsep cerita di dalam *Peradilan Rakyat* ini bersifat umum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa tidak hanya mengenai kekuasaan dari penguasa kepada rakyat tetapi juga berisi doktrin yang bersifat intelektual, sehingga tokoh aku yang digambarkan sebagai seorang pengacara muda memiliki jiwa patriotik yang diwarisi dari sang ayah. Doktrin intelektual tersebut juga berpengaruh pada pola sikap yang dimiliki oleh sang pengacara muda yang menjadi sangat bertanggung jawab dan berani mengambil segala resiko.

Pembahasan yang mengacu pada sebuah penguasaan yang bersifat mempengaruhi pola pikir orang menjadi gambaran umum isi cerita pendek yang berjudul “*Peradilan Rakyat*”. Sedangkan teori hegemoni merupakan sebuah teori yang mengacu pada kekuasaan yang bersifat sentral atas atasan dengan bawahan, Negara dengan rakyat, dan penguasa dengan budak. Selain itu. Hegemoni tidak berarti pula kekuasaan yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif yakni doktrin intelektualitas, misalnya dari seorang dosen pada mahasiswa, ayah dengan anak, dan lain sebagainya. Hegemoni sebagai konsep untuk mendominasi, mengarahkan dan mengendalikan orang lain melalui ide dan gagasan mampu mendukung kekuasaan

kelompok sosial tertentu. Pada hakikatnya hegemoni akan selalu punya taktik untuk terus menerus memperoleh dukungan dan sebaliknya yang tertindas tidak selalu berani melakukan perlawanan. Mengacu pada hal tersebut teori hegemoni sesuai apabila digunakan sebagai sebuah pisau untuk membedah isi dari cerpen yang berjudul “Peradilan Rakyat”. Oleh sebab itu, penerapan teori hegemoni yang digunakan untuk menganalisis esensi dari cerpen “Peradilan Rakyat” sesuai dan akan membantu membedah isi dari cerpen “Peradilan Rakyat”.

B. Keterkaitan Hegemoni dengan Esensi Cerita Pendek “Peradilan Rakyat”

Kembali pada konsep hegemoni yang ditekankan untuk menganalisis esensi cerpen “Peradilan Rakyat”. Sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan: (ideologi) mendiktekan seluruh cita, ras, kebiasaan, moral, prinsip-prinsip religius, dan politik, serta seluruh hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral (Gramsci. 1891). Gramsci berpendapat bahwa agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

Ada dua hal penting yang ditekankan dari teori yang digunakan untuk membedah “Peradilan Rakyat” yakni konsep hegemon:

1. Kontrol koersif kekuasaan yang bersifat fisik adanya ancaman jika kepemimpinan hegemoni bersifat rendah atau menurun.
2. Kontrol konsensual. Bersifat ideologi baik intelektualitas atau moralitas yang digunakan untuk mendoktrin tokoh lain sehingga paradigm yang digunakan untuk berfikir patuh dan tunduk terhadap orang yang membuat doktrin.

Dua hal pokok tersebut akan disinkronkan dengan esensi cerita yang ada pada cerpen “Peradilan Rakyat”. Baik hubungan antartokoh, kedudukan nilai-nilai pemerintahan dengan rakyat, doktrin yang bersifat individu, bahkan doktrin sosial yang dimunculkan dalam cerpen tersebut. Untuk gambaran teks secara langsung akan dibahas di bawah ini.

Cerpen “Peradilan rakyat” ini mencerminkan apa yang ada di dalam teori di atas (model kontrol koersif, konsensual, dan ideologi). Kontrol koersif tampak pada bagaimana rakyat mengadili Negara karena sistem hegemoni dalam Negara lemah, seorang pengacara tua yang merasa ada sebuah kekuatan dalam dirinya berani menghegemoni penjahat yang sembunyi di balik kursi dan gedung bertingkat, Negara terhadap pengacara muda, Negara memiliki kekuatan langsung, dan rakyat terhadap pengacara muda. Kontrol konsensual tampak pada berisi hegemoni ayah terhadap anak, memberikan banyak doktrin untuk selalu bersikap jujur dan profesional, anak terhadap ayah di mana sang anak tidak ingin ayahnya ikut campur dalam menentukan keputusan, pengacara muda terhadap Negara, seorang pengacara muda berkat sikap profesionalismenya dan kebijaksanaanya mampu menolak tawaran Negara atau bentuk hegemoni dari Negara yang menginginkannya untuk menjadi pembela atas kasus penjahat kelas kakap.

C. Bentuk Hegemoni Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya Melalui Sudut Pandang Kontrol Koersif

Kata kunci dari koersif adalah adanya ancaman yang bersifat langsung dari dominasi pemerintahan terhadap rakyat atau bawahan. Ancaman yang bersifat langsung karena menilai bahwa sistem kekuasaan yang digunakan dalam pemerintahan lemah dan perlu mendapat perhatian. Ancaman dapat datang dari rakyat yang menginginkan keadilan kepada pemerintah. Sistem pemerintahan yang lemah akan berdampak pada pemberian sorotan yang tajam dari berbagai pihak.

1. Bentuk Hegemoni Pengacara Muda Terhadap Negara dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Tidak hanya rakyat yang berkedudukan langsung dalam pengancaman nilai pemerintah yang mulai berkuasa dan seenaknya sendiri. Namun, pegawai yang terlepas dari jabatannya juga merupakan rakyat. Pegawai yang menunjukkan eksistensinya sebagai pengacara yang handal juga dapat mengancam Negara atau pemerintahannya kalau memang kondisi pemerintahan lemah dan jauh dari rasa keadilan, seperti dalam cuplikan, *“aku datang ke mari sebagai seorang pengacara muda yang ingin menegakkan keadilan di negeri yang sedang kacau ini (Wijaya. 2003: 1).”* Cuplikan tersebut sebagai petanda bahwa keadaan pemerintahan yang ada sekarang dalam kondisi yang lemah dan jauh dari rasa keadilan. Seorang pengacara muda bertindak sebagai rakyat sekaligus seorang pengacara yang akan memberikan ancaman terhadap pemerintahan yang jauh dari rasa keadilan.

Kondisi pemerintahan yang lemah juga ditekakan oleh seorang pengacara tua yang merasa cemas dan sedikit mengancam pemerintahan. Tampak pada cuplikan, *“... kamu sebagai ujung tombak pencarian keadilan di negeri yang sedang dicabik-cabik korupsi ini (Wijaya. 2003: 1).”* Kondisi pemerintahan yang benar-benar lemah dan tampaknya ingin mempermainkan keadilan mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan termasuk pengacara muda dan tua. Dua pengacara tersebut bermaksud untuk memberikan sebuah ancaman kepada birokrasi pemerintahan untuk dapat membuktikan bahwa pemerintahan dalam waktu dekat akan dapat digulingkan karena kelakuannya sendiri.

Hegemoni seorang pengacara muda terhadap Negara juga tampak pada cuplikan berikut.

“Belum lama ini Negara menugaskan aku untuk membela seorang penjahat besar, yang sepatasnya mendapat hukuman mati. Pihak keluarga pun datang dengan gembira ke rumahku untuk mengungkapkan kebahagiaannya, bahwa pada akhirnya Negara cukup adil, karena memberikan pembela kelas atas untuk mereka. Tetapi aku tolak mentah-mentah (Wijaya. 2003: 2).”

Tampak bahwa seorang pengacara muda yang dengan tegas dan bijaksana menolak permintaan Negara untuk membela bajingan kelas kakab tersebut. Penolakan tersebut merupakan bentuk hegemoni langsung dari pengacara muda terhadap Negara. Penolakan yang bersifat koersif atau mengacu pada kekerasan meski tidak pada arti yang sebenarnya. Adanya ancaman dari seorang pengacara muda kepada Negara membuktikan bahwa sistem pemerintahan yang ada di dalam Negara jauh dari kata keadilan.

Kondisi senada juga ditekankan pada cuplikan berikut, *“Aku ingin berkata tidak kepada Negara, karena pencarian keadilan tidak boleh menjadi sebuah teater, tetapi mutlak hanya pencarian keadilan yang kalau perlu dingin dan beku (Wijaya. 2003: 2).”* Hegemoni diri terhadap suatu Negara yang mengindikasikan sebuah ancaman terhadap Negara.

“Negara harusnya percaya bahwa menegakkan keadilan tidak bisa lain harus dengan keadilan yang bersih, sebagaimana yang sudah Anda lakukan selama ini (Wijaya. 2003: 2).” Banyak dipergunjingkan persoalan Negara yang benar-benar mengindikasikan bahwa Negara sedang dalam keadaan yang lemah dan terancam guling. Lemah bukan karena lemah keuangan, namun lebih kepada lemah kejujuran dan sistem yang dibangung jauh dari harapan.

Seorang pengacara yang tangguh, bijaksana, dan professional berani memberikan hegemoni yang bersifat keras terhadap suatu Negara. Negara yang tampak kuat namun sebenarnya lemah berhasil diancam oleh pengacara muda yang professional dan rakyat Indonesia, seperti dalam cuplikan berikut.

“Jangan dulu mempersoalkan kebenaran. Tapi kau telah menunjukkan dirimu sebagai professional. Kau tolak tawaran Negara, sebab di balik tawaran itu tidak hanya adanya usaha pengejaran pada kebenaran dan penegakan keadilan sebagaimana yang kau kejar dalam profesimu sebagai ahli hukum, tetapi di situ sudah ada tujuan-tujuan politik (Wijaya. 2003: 3).”

Eksistensi seorang pengacara muda dengan segala kebenarannya berhasil membius kekuasaan yang macet. Hal tersebut sinergi dengan konsep koersif yang menunjukkan ancaman langsung dari bawahan terhadap suatu birokrasi yang lemah sistemnya. Hal senada juga ditunjukkan dalam cuplikan berikut. *“... Bagaimana kalau dia sampai menang? “Negara yang akan mendapat pelajaran penting. Jangan main-main terhadap kejahatan (Wijaya. 2003: 5)!”* Ada nada ancama terhadap suatu birokrasi, yang jelas rakyat yang akan mengadili terhadap sebuah sistem yang tidak sehat. Negara akan mendapat pelajaran berarti telah ada kesepakatan kepada rakyat Indonesia untuk sama-sama menggulingkan pemerintahannya termasuk pada penguasa-penguasa yang gila kekuasaan.

Bukti tersebut ditegaskan kembali dalam cuplikan berikut.

“... aku akan memenangkan perkara ini dan itu berarti akan membebaskan bajingan yang ditakuti dan dikutuk oleh seluruh rakyat di negeri ini untuk terbang lepas seperti burung di udara. Dan semoga itu akan membua negeri kita ini menjadi lebih dewasa secepatnya. Kalau tidak kita akan tetap menjadi bangsa yang lalai (Wijaya. 2003: 6).”

Bentuk hegemoni langsung yang diberikan oleh seorang pengacara kepada Negara yang memang telah melupakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kebenaran tak ubahnya seperti telapak tangan yang kapan pun dapat dibalik. Ini adalah ancaman yang bersifat koersif atau langsung untuk dijadikan pelajaran penting bagi semuanya khususnya Negara.

2. Bentuk Hegemoni Rakyat Terhadap Negara dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Sama halnya dengan pembahasan di atas. Namun, pembahasan ini lebih merujuk pada bentuk ancaman langsung atau hegemoni langsung dari rakyat

kepada Negara karena pengaplikasian sistem yang di luar kebenaran. Namun, hegemoni rakyat kepada birokrasi atau pemerintahan yang ditampak pada cerpen “Peradilan Rakyat” ini lebih bersifat radikal dan berbeda dengan penjelasan di atas. Secara substansial pembahasan dan rujukan teori yang digunakan sama dan senada, namun secara esensi lebih menguatkan pada hegemoni rakyat dari pada hegemoni pengacara muda. Hegemoni pengacara muda hanya sebatas pengancaman yang diberikan secara langsung kepada birokrasi namun tidak pada kekerasan yang sebenarnya, kekerasan yang digunakan adalah kekerasan intelektual atau ancaman intelektual. Sedangkan pada hegemoni rakyat kekerasan yang digunakan langsung pada kekerasan yang sebenarnya, ancaman by doing. Bentuk menggulingkan pemerintahan, membunuh jaksa, dan membunuh pengacara muda itu bentuk kekerasan yang nyata atau langsung dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan cuplikan berikut.

“Rakyat pun marah. Mereka terbakar dan mengalir bagai lava panas ke jalanan, menyerbu dengan yel-yel dan poster-poster raksasa. Gedung pengadilan diserbu dan dibakar. Hakimnya diburu-buru. Pengacara muda itu diculik, disiksa, dan akhirnya baru dikembalikan sesudah jadi mayat (Wijaya. 2003: 7).”

“Tetapi itu pun belum cukup, rakyat masih menggaum dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah (Wijaya. 2003: 7).”

Kekerasan tampak langsung dilakukan oleh rakyat kepada pihak-pihak yang memang ikut andil dalam proses pembebasan bajingan kelas kakab tersebut. Bentuk nyatanya adalah penggulingan pemerintahan, perusakan sarana dan prasarana atau gedung, bahkan sampai pada penculikan dan pembunuhan seorang jaksa dan pengacara. Ini merupakan ancaman yang sebenarnya dan kekerasan dalam bentuk nyata. Pada konsep koersif ini memang ditekankan dan memang tampak pada struktur cerita. Kekerasan tersebut muncul karena rakyat tidak terima dengan putusan hakim yang membebaskan bajingan kelas kakab tersebut. Rakyat berpandangan bahwa sudah terjadi kebohongan public dan sudah terjadi manipulasi kebenaran. Rakyat mencari tahu siapa di balik peristiwa pembebasan bajingan tersebut dan mencoba untuk memberikan pengadilan kepada mereka.

3. Bentuk Hegemoni Rakyat Terhadap Pengacara Muda dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya. Bentuk hegemoni rakyat terhadap pengacara muda adalah penghakiman langsung atau sudah tidak lagi bersifat ancaman. Bentuk pengadilan langsung tersebut tergambar adanya peristiwa penculikan, penganiayaan, dan sampai menimbulkan kematian. Ini adalah bentuk hegemoni rakyat terhadap pengacara muda yang memang dia secara langsung yang membrikan kebebasan terhadap bajingan setelah peluang yang diberikan oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan cuplikannya, *“... Pengacara muda diculik, disiksa, dan akhirnya baru dikembalikan setelah menjadi mayat (Wijaya. 2003: 7).”*

4. Bentuk Hegemoni Pengacara Tua Terhadap Penjahat (Bajingan Kelas Kakab) dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Bentuk pengadilan yang langsung dilakukan oleh pengacara tua untuk memburu semua bajingan yang bersembunyi dibalik kursi kekuasaan dan gedung-gedung bertingkat memberikan pandangan bahwa Negara yang mulai tidak bersih ini sudah ada perlakuan langsung untuk mengadilinya. Perlakuan langsung tersebut merupakan ancaman *by doing* yang dilakukan untuk memberantas segala bentuk penjahat yang suka melakukan korupsi dan kejahatan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan cuplikan berikut.

“ Aku memang tidak pernah berhenti memburu pencuri-pencuri keadilan yang bersarang di lembaga-lembaga tinggi dan di gedung-gedung bertingkat. Merekalah yang sudah membuat kejahatan menjadi budaya di negeri ini (Wijaya. 2003: 1). ”

Menjadi tampak sederhana namun luar biasa apa yang telah dilakukan oleh pengacara tua terhadap Negara ini khususnya penjahat (bajingan kelas kakab). Bentuk hegemoni yang dilakukan oleh pengacara tua akan memberikan pelajaran berharga kepada bajingan kelas kakab. Konsep ini merupakan bentuk ancaman langsung sekaligus bentuk perlakuan langsung terhadap Negara dan pelaku kejahatan.

D. Bentuk Hegemoni Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya Melalui Sudut Pandang Kontrol Konsensus

1. Bentuk Hegemoni Negara Terhadap Pengacara Muda dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Konsep ini muncul ketika individu secara sukarela mendukung dengan kelompok yang mendominasi. Basis pikiran, intelektual, dan kemampuan kritis kelompok sosial masyarakat yang di bawa pada sistem kepemimpinan yang terpusat. Bentuk-bentuk pemikiran, doktrin, dan ideologi yang dapat mendorong lawan atau orang lain mengubah pola pikir dan paradigmanya yang terpusat pada seseorang atau kepemimpinan termasuk ke dalam konsep konsensus. Birokrasi atau kepemimpinan terpusat memegang kendali dan fungsi kepemimpinan yang besar dan akan mempengaruhi bawahannya. Hal tersebut sesuai dengan cuplikan berikut.

“Negara menugaskanku untuk membela seorang penjahat besar, yang sepatasnya mendapat hukuman mati. Pihak keluarga pun datang dengan gembira ke rumahku untuk mengungkapkan kebahagiaannya, bahwa pada akhirnya Negara cukup adil, karena memberikan pembela kelas atas untuk mereka (Wijaya. 2003: 2)

Bentuk hegemoni Negara yang memegang kekuasaan penuh telah menunjukkan fungsinya, yakni mempengaruhi orang lain dan memberikan tanggung jawab kepada bawahan terkait dengan unsur pembelaan yang harus didapatkan oleh bajingan kelas kakab tersebut. Bentuk penugasan baik yang diberikan secara lisan maupun tertulis itu wujud dari kata hegemoni penguasa (Negara) terhadap pegawainya atau bawahannya. Ini merupakan bentuk penugasan yang memang tidak sesuai dengan gambaran kebenaran.

“... Kenapa? Karena aku yakin, Negara tidak benar-benar menugaskan aku untuk membelanya. Negara hanya ingin mempertunjukkan teater yang spektakuler, bahwa di negeri yang sangat tercela hukumnya ini telah muncul kebangkitan baru (Wijaya. 2003: 2).”

Bentuk hegemoni yang diberikan oleh atasan (negara) kepada bawahan tidak serta merta dapat mengubah sistem pemikiran manusia. Hal tersebut bergantung pada pola sikap dan pola pikir manusia untuk menindaklanjuti hegemoni yang diberikan. Oleh sebab itu, cuplikan tersebut menggambarkan dua hegemoni yakni hegemoni oleh Negara dan hegemoni rakyat pada Negara.

“Tapi Negara terus mendesak dengan berbagai cara supaya tugas itu aku terima. Di situ aku mulai berfikir. Tak mungkin semua itu tanpa alasan. Lalu aku melakukan investigasi secara mendalam dan kutemukan faktanya. Walhasil, kesimpulanku, Negara sudah memainkan sandiwara. Negara ingin menunjukan kepada rakyat dan dunia, bahwa kejahatan dibela oleh siapa pun tetaplah kejahatan. Bila Negara menjebloskan si bangsat itu sampai ke titik terakhirnya, hukuman mati, walaupun sudah dibela oleh orang seperti aku, maka Negara akan mendapatkan kemenangan ganda, karena kemengan itu pastilah kemenangan telak dan bersih, karena aku yang menjadi jaminanya (Wijaya. 2003: 2).”

Desakan yang dimaksudkan tersebut merupakan bentuk paksaan tindakan dan pemikiran untuk menghegemoni bawahan. Desakan sebagai langkah agar orang yang dihegemoni dapat menerima hegemoni darinya. Hegemoni di sini lebih bersifat negatif. Negara mendesak agar tugas yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh pengacara muda. Namun, tidak demikian faktanya, hegemoni yang diberikan oleh Negara ditentang oleh pengacara muda. Tampaknya pengacara muda lebih memilih menghegemoni Negara dengan dia enggan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negara.

2. Bentuk Hegemoni Pengacara Tua Terhadap Pengacara Muda dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Hegemoni yang merujuk pada konsensus berada di luar batas kekerasan. Hegemoni ini lebih bersifat ideologi dan doktrin pemikiran yang memanfaatkan birokrasi sebagai batas kekuasaan. Pengacara tua banyak memberikan doktrin positif berupa ideologi (konsep berfikir) yang digunakan untuk mengubah pola pikir orang lain seperti tampak pada cuplikan berikut.

“Tentu saja. Aku juga pernah muda seperti kamu. Dan aku juga berani, kalau perlu kurang ajar. Aku pisahkan antara urusan keluarga dan kepentingan pribadi dengan perjuangan penegakan keadilan (Wijaya. 2003: 1).”

Hegemoni yang diberikan berupa hegemoni yang lebih bersifat intelektual, pelajaran moral diberikan oleh pengacara tua (ayah) kepada pengacara muda (anak) dan dapat digunakan untuk mengubah paradigma dan prinsip pola pikir manusia. Sifat berani, kurang ajar, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan keluarga tampak pada cuplikan tersebut. Sehingga, hal tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap pola pikir sang pengacara

muda dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pengacara yang professional sampai-sampai nyawa menjadi taruhannya.

“Tidak apa, jangan surut. Katakan saja apa yang hendak kamu katakan, sambung pengacara tua menenangkan, sembari mengangkat tangan, menikmati juga pujian itu, “jangan membatasi dirimu sendiri. Jangan membunuh diri dengan deskripsi-deskripsi yang akan menjebak kamu ke dalam doktrin-doktrin beku, mengalir sajalah sewajarnya bagaikan mata air, bagai suara alam, karena kamu sangat diperlukan oleh bangsamu ini (Wijaya. 2003: 2).”

Itu memberikan gambaran bagaimana seorang pengacara tua memberikan doktrin positif yang bersifat intelektual digunakan untuk mengubah paradigma dan memberikan nasihat kepada pengacara muda. Pemikiran yang dimainkan dalam proses tersebut. Pemikiran yang baik, positif, dan bertanggung jawab telah ditularkan oleh pengacara tua kepada pengacara muda untuk hidup yang lebih baik. Hal tersebut juga tampak pada cuplikan berikut, “Jangan meremehkan jaksa-jaksa yang diangkat oleh Negara. Aku dengar sebuah tim yang sangat tangguh akan diturunkan (Wijaya. 2003: 4).”

3. Bentuk Hegemoni Ayah Terhadap Anak dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

“Apa yang ingin kamu tantang, anak muda?” Pengacara muda tertegun. “Ayahanda bertanya kepadaku?” “Ya, kepada kamu, bukan sebagai putraku, tetapi kamu sebagai ujung tombak pencarian keadilan di negeri yang sedang dicabik-cabik korupsi ini.” Pengacara muda itu tersenyum. “Kalau begitu, Anda mengerti maksudku.”

Berdasarkan cuplikan tersebut tampak bahwa seorang ayah menghegemoni anaknya. Hegemoni tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga positif. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh yang menunjukkan adanya hegemoni yang bersifat positif misalnya seorang dosen menghegemoni masalah intelektual kepada mahasiswa, seorang guru pada murid, orang tua kepada anak. Cuplikan tersebut menggambarkan bahwa hegemoni yang terjadi di antara ayah dengan anak biasanya memang bersifat intelektual.

“... Berarti kita bisa berbicara sungguh-sungguh sebagai professional, pemburu keadilan.” “Itu semua juga tidak lepas dari hasil gemblenganmu yang tidak kenal ampun!” Pengacara tua itu tertawa.” Kau sudah mulai lagi dengan pujian-pujianmu!” Potong pengacara tua... (Wijaya. 2003: 1).”

Gemblengan-gemblengan yang dimasud sebagai sebuah doktrinasi seorang ayah kepada anak sebagai bentuk pengurusan proses berfikir untuk mengubah paradigma menjadi yang lebih baik. Hal tersebut membuktikan bahwa hegemoni tidak selamanya buruk. Hegemoni yang bersifat positif jika diterima dengan baik akan mengubah pola sikap dan pikir menjadi pribadi yang baik.

“Aku kira tak ada yang perlu dibahas lagi. Sudah jelas. Lebih baik kamu pulang sekarang. Biarkan aku bertemu dengan putraku, sebab aku sudah sangat rindu pada dia (Wijaya. 2003: 6).

“Pengacara muda itu jadi amat terharu. Ia berdiri hendak memeluk ayahnya. Tetapi orang tua itu mengangkat tangan dan memperingatkan dengan suara yang serak. Nampaknya sudah lelah dan kesakitan (Wijaya. 2003: 6).”

“... Bukankah sudah aku ingatkan, aku rindu kepada putraku. Lupakan kamu bahwa kamu bahwa kamu bukan saja seorang profesional, tetapi juga menjadi seorang putra dari ayahmu. Tak ingin kau mendengar apa kata ayah kepada putranya, kalau berhadapan kepada perkara, di mana seorang penjahat besar yang terbebaskan akan menyulut peradilan rakyat seperti bencana yang melanda di negeri kita sekarang ini (Wijaya. 2003: 7)?”

Berdasarkan cuplikan tersebut tampak adanya hubungan yang erat terjalin antara ayah dengan anak. Mengharapkan ia lekas pulang dan kembali menjadi seorang putra yang dikangeni oleh sang ayah.

4. Bentuk Hegemoni Anak Terhadap Ayah dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

“Katakan kepada ayahanda, bahwa bukti-bukti yang sempat dikumpulkan oleh Negara terlalu sedikit dan lemah. Peradilan ini terlalu tergesa-gesa. Aku akan memenagkan perkara ini dan itu berarti akan membebaskan bajingan yang ditakuti dan dikutuk oleh seluruh rakyat di negeri ini untuk terbang bebas seperti burung di udara (Wijaya. 2003: 6).”

“...Tapi aku datang tidak sebagai putramu, “kata pengacara muda itu, “aku datang kemari sebagai pengacara muda yang ingin menegakkan keadilan di negeri ini...”Apa yang ingin kamu tantang, anak muda?” pengacara muda tertegun. Ayahanda bertanya kepadaku?”. Ya, kepadamu bukan sebagai putraku tetapi sebagai ujung tombak pencari keadilan (Wijaya. 2003: 1).”

Dua cuplikan di atas sebagai gambaran bahwa cara anak menghegemoni ayah berbeda dengan cara ayah menghegemoni anak. Anak menghegemoni ayah melalui cara yang halus namun pasti dan logis. Anak seperti pada cuplikan yang pertama, meyakinkan ayahnya dia akan memenangkan perkara namun melalui alasan-alasan yang logis. Cuplikan dua menggambarkan keduanya saling memunyai argument yang saling mendukung.

5. Bentuk Hegemoni Sekretaris Terhadap Pengacara Muda dalam Cerita Pendek “Peradilan Rakyat” Karya Putu Wijaya

Terdapat berbagai hegemoni seperti yang telah dijelaskan di depan, meliputi hegemoni kekuasaan, hegemoni intelektual, dan hegemoni perasaan. Penggunaan teori hegemoni ini bergantung pada sudut pandang dan konteks sehingga dapat dikategorikan dengan benar. Hegemoni rasa atau perasaan sering muncul sebagai akibat hubungan antarpersona. Bentuk kagum, cinta, dan belunggu asmara merupakan satu dari berbagai manifestasi dari hegemoni. Seperti halnya dengan hegemoni yang dilakukan oleh sekretaris cantik kepada pengacara muda, lihat cuplikan berikut.

“Sekretarisnya yang muda menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, wanita tersebut menoleh kepada pengacara muda. “Maaf saya kira pertemuan

harus diakhiri di sini, pak. Beliau perlu banyak beristirahat. Selamat malam (Wijaya. 2003: 6)."

"Entah karena luluh oleh senyum bibir wanita yang memiliki mata yang indah, pengacara muda itu tak mampu lagi menolak (Wijaya. 2003: 6)."

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada dua model hegemoni yang sering digunakan dalam cerita pendek "Peradilan Rakyat". Pertama, konsep koersif dalam cerpen "Peradilan Rakyat" terbangun dalam beberapa hegemoni yakni, (1) bentuk hegemoni pengacara muda terhadap Negara, (2) munculnya ancaman dari pengacara muda yang diperuntukan kepada Negara agar sistem yang lemah dapat diperbarui menjadi lebih baik dan keadilan dapat kembali dijunjung, (3) bentuk hegemoni rakyat terhadap Negara memunculkan perlakuan yang radikal sebagai upaya untuk memburu keadilan, (4) bentuk hegemoni rakyat terhadap pengacara muda memunculkan perlakuan dari rakyat kepada pengacara muda dalam bentuk penculikan dan pembunuhan karena pengacara muda sebagai penyebab bebasnya penjahat kelas kakap, (5) bentuk hegemoni pengacara tua terhadap penjahat memunculkan perilaku yang bijaksana dan berlandaskan atas kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pengacara atas dasar rasa tanggung jawab.

Kedua, terbangun dalam beberapa hegemoni yakni, (1) bentuk hegemoni Negara terhadap pengacara muda. Kekuasaan yang dominan memberikan paksaan penuh kepada bawahan tampak sekali pada bagian hegemoni Negara terhadap pengacara muda. (2) Bentuk hegemoni pengacara tua terhadap pengacara muda, hegemoni bagian ini lebih kepada pemberian doktrin yang bersifat menggurui dan intelektualitas yang tinggi dimaksimalkan dalam hegemoni ini. (3) Bentuk hegemoni ayah terhadap anak, seorang ayah yang selalu mengajarkan prinsip-prinsip positif untuk perubahan konsep berfikir yang baik dan idealis. (4) Bentuk hegemoni anak terhadap ayah. Pola keyakinan yang diberikan oleh anak kepada ayah sebagai wujud hegemoni dari anak kepada ayah. (5) Bentuk hegemoni sekretaris terhadap pengacara muda. (6) Rasa atau perasaan yang terkadang mengelabui logika dan terkadang menggurui segala gerak kita tanpa pada hegemoni atas kecantikan sang sekretaris kepada pengacara muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Andi dan Nizar Patria. 2009. Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chomis. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Sendang Siraman: Surabaya.
- Kebung, K. 2017. *Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Kontek 'Kekuasaan' di Indonesia*. Melintas, 33.1, 34-51.
- Najid. 2004. *Apresiasi Prosa Fiksi*. Unesa Press. Surabaya
- Semi, Atar. 1988. *Anatomi Sastra*. Padang: Angkasa Raya.
- Siswanto, Wahyudi. 2008. *Pengantar Teori Sastra*. PT Grasindo: Jakarta.
- Siswanto, Wahyudi. 2008. *Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Grasindo.

- Supratno, Haris. 2010. *Sosiologi Seni Wayang Sasak Lakon Dewi Rengganis dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Lombok*. Surabaya: Unesa University Press.
- Storey, John. 2007. *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*, terj. Laily Rahmawati. Yogyakarta: Jalasutra.